

Pengembangan Aplikasi Transparansi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Eva Argarini Pratama¹, Riyad Nur Firmansyah², Widi Puspita Rini³, Anida Sabilal Khoeroh⁴

^{1,2,3,4} Universitas Bina Sarana Informatika

^{1,2,3,4}Jalan Kramat Raya No.98, Senen, Jakarta Pusat, Indonesia

e-mail: ¹eva.eap@bsi.ac.id, ²sahfirman523@gmail.com, ³widipusparini01@gmail.com,
⁴anidaa.sabilal@gmail.com

Abstrak - Saat ini masyarakat masih banyak yang belum mengetahui perbedaan antara dana desa dan alokasi dana desa maupun kegunaan dari dana desa dan alokasi dana desa. Dikarenakan kurangnya sosialisasi dan transparansi dana untuk masyarakat dari pemerintah. Sehingga masyarakat bertanya-tanya tentang anggaran tersebut apakah sudah tepat sasaran ataukah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Pada dasarnya dana desa adalah dana atau keuangan yang bersumber dari APBN yang dapat dimanfaatkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dan dana tersebut digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pembiayaan masyarakat dan lain-lain. Sedangkan alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota untuk desa yang dibagikan secara proposional. Oleh karena itu dengan berkembangnya teknologi informasi kami ingin membuat sebuah aplikasi tentang dana desa dan alokasi dana desa untuk masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk hal apa secara terinci. Manfaat lain dari aplikasi dana desa dan alokasi dana desa adalah masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung dana tersebut mengingat fakta banyaknya kasus korupsi di kalangan perangkat desa dan ini sama sekali bukan rahasia lagi.

Kata Kunci : *transparansi, alokasi, dana, desa, aplikasi*

Abstracts - Currently, there are still many people who do not know the difference between village funds and village fund allocations as well as the use of village funds and village fund allocations, due to the lack of socialization and transparency of funds for the community from the government. So people are wondering whether the budget is right on target or is it being misused by certain parties. Basically, village funds are funds sourced from the APBN which are intended for villages which are transferred through the district/city regional budget. And these funds are used to finance government administration, development implementation, community financing, etc. Meanwhile, the allocation of village funds is the part of village finances obtained from regional tax revenue sharing and part of the central and regional financial balance funds received by districts/cities for villages which are distributed proportionally. Therefore, with the development of information technology, we want to make an application about village funds and village fund allocations for the community, so that people can easily find out what village funds provided by the central government are and what they are used for in detail. Another benefit of the application of village funds and allocation of village funds is that the community can directly supervise these funds considering the fact that there are many cases of corruption among village officials and this is not a secret at all.

Keywords : *transparency, allocation, funds, village, application*

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan suatu desa, diperlukan adanya sumber pendanaan (keuangan) untuk kebutuhan peningkatan sumber daya manusia ataupun infrastruktur, keuangan sendiri berasal dari terjemahan kata *monetary* atau moneter, sedangkan kata *finance* mempunyai arti pembiayaan. Sementara itu, istilah keuangan negara biasa dikaitkan dengan *public finance*. *Finance* atau pembiayaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan uang atau dana (Khoiriah & Meylina, 2016). Pada desa sendiri terdapat dana untuk desa yang dibagi menjadi dua jenis, yang pertama biasa disebut dengan Dana Desa (DD) bersumber dari APBN yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Swastika, 2019). Yang



kedua adalah Alokasi Dana Desa (ADD) menurut pasal 1 angka 9 tentang peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015. Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ("pp 47/2015") yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi dana Alokasi khusus, dalam arti yang lain alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten (Karimah et al., 2014). Alokasi Dana Desa dibagi kesetiap desa dengan mempertimbangkan: (1) kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, (2) jumlah penduduk desa, (3) angka kemiskinan, (4) wilayah desa dan (5) tingkat kesulitan geografis desa. Ketentuan mengenai pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa kepada setiap desa di tetapkan dengan Bupati/Walikota. Jadi salah satu sumber pendapatan desa adalah Alokasi Dana Desa yang merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota. Alokasi tersebut paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Seperti dikutip dalam surat kabar online kompas.com yang menyatakan bahwa pemerintah bertekad mengalokasikan dana desa dengan total Rp.400 triliun selama 5 tahun kedepan hingga 2024. Karena anggaran desa memang setiap tahunnya mengalami peningkatan (Gatra, 2019). Sejauh ini pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa mencapai Rp.257 triliun sejak 2015 hingga 2019. Total dana desa sebesar Rp.257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Dengan rincian Rp.20,67triliun (2015), Rp.46,98 triliun (2016), Rp.60 triliun(2017), Rp.60 triliun(2018), Rp.70 triliun (2019). Dana desa tersebut diberikan keseluruh desa di seluruh Indonesia dengan formula 77% dibagi rata keseluruh desa kemudian 20% dialokasikan untuk tambahan secara proposional kepada desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah .Kemudian 3% dialokasikan untuk tambahan kepada desa-desa yang ber status tertinggal.

Melihat data di atas bahwa dana desa selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun maka perlu adanya pengelolaan yang baik oleh pihak desa, dimana pengelolaan dapat diartikan dengan suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu (Kadir & Moonti, 2018) dan tentunya juga perlu adanya pengawasan dari masyarakat secara langsung tentang dana desa tersebut salah satu jalan dapat dengan transparansi dana. Secara garis besar transparansi adalah seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung jawaban (Ramadani, 2018). Karena untuk menghindari dana desa tidak digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kesepakatan dengan masyarakat atau dapat diartikan dana desa yang di selewengkan oleh perangkat desa atau dengan kata lain perangkat desa tersebut melakukan Tindakan korupsi. Beberapa upaya dilakukan untuk mencegah hal ini dapat terjadi, selain dari undang-undang atau kebijakan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti UU No.20 Tahun 2001 yang memuat perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, upaya yang lain adalah pemanfaatan teknologi seperti pada contoh aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi Jambi yaitu aplikasi Sistem Informasi Kawal Dana Desa (SIKADD) yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan, pengawalan dan partisipasi dalam transparansi penggunaan dan penyaluran dana desa dengan melibatkan Bhabinkamtibmas Polda Jambi dan Kepala Desa guna memajukan perekonomian masyarakat Jambi yang lebih baik (Sopwan, 2020). Melihat adanya aplikasi ini masih terdapat kekurangan dimana bentuk transparansi hanya berdasarkan foto dari salah satu pihak (pemerintahan desa) dan tidak adanya keterlibatan masyarakat sebagai penerima/ pemakai implementasi dari dana desa, maka dengan memanfaatkan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada peneliti mengangkat tema Aplikasi Transparansi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dimana nantinya aplikasi ini nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dapat mengetahui pemasukan dana desa dari pusat secara rinci dan masyarakat juga bisa mengetahui dana tersebut akan di realisasikan kemana. Manfaat lain dari aplikasi tersebut adalah adanya form komentar dari warga mengenai pelaporan penggunaan baik Dana Desa ataupun Alokasi Dana Desa sehingga menimbulkan sistem *check and balance* antara perangkat desa dengan masyarakat dan juga pemerintah pusat yang ada di atas perangkat desa sebagai pemberi dana. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan untuk permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana Dana desa dan Alokasi dana desa dapat bersifat transparan untuk masyarakat Dan bagaimana solusi Dana desa dan Alokasi dana desa dapat bersifat transparan untuk masyarakat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah dengan adanya aplikasi ini nantinya dapat mempermudah masyarakat dalam meninjau langsung dana desa dan alokasi dana desa, dan jangka panjangnya diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan daerah. Manfaat yang akan dicapai pun dapat dibagi menjadi 2, yaitu manfaat secara teoritis yaitu dapat memberikan deskripsi terkait studi kasus disiplin ilmu yang terkait dengan pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat kesejahteraan masyarakat dan dapat memberikan kemudahan untuk para peneliti selanjutnya untuk membuat terobosan baru tentang transprasi dana desa dan alokasi dana desa. Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan adalah dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk

mengetahui secara jelas kucuran dana dari pusat yang dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mereka dan menyampaikan kritik, saran, atau segala masukan kepada pemerintah yang berkaitan dengan program-program yang selama ini diimplementasikan terhadap penggunaan Dana Desa terutama dalam hal pengembangan masyarakat dan pembangunan desa. Pemerintah desa bisa mengevaluasi program – program kepada masyarakat terkait dengan implementasi Dana Desa, baik evaluasi dari pemerintah desa itu sendiri maupun evaluasi yang datang dari masyarakat, karena hal ini dapat menunjukkan sebuah demokrasi sejuk dalam membangun desa melalui Dana Desa berbasis aplikasi mobile transparansi dana desa dan alokasi dana desa, dan dapat memberikan alternatif solusi bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam mengimplementasikan Dana Desa berbasis aplikasi mobile transparansi dana desa dan alokasi dana desa.

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada penelitian terdahulu sebagai referensi pendukung penelitian tersebut ataupun sebagai pembanding agar penelitian yang dilakukan memiliki nilai keunikan gagasan tersendiri dan terhindar dari plagiarisme. Penelitian yang pertama adalah yang dilakukan oleh Muhammad Mulfi dan Dikau Tondo Prastyo yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Keuangan Desa (Sikades) 1.0 Berbasis Android, dengan hasil penelitian suatu prototype aplikasi keuangan desa berbasis android dan output aplikasi adalah menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Mufli & Prastyo, 2018), yang menjadi pembeda utama adalah Prototype aplikasi pada penelitian ini berbasis web yang juga bisa diakses siapa saja, kapan saja, dan dimana saja dan penelitian yang sebelumnya berbasis android dan menitik beratkan pemakaian pada pengelolaan keuangan dan laporan keuangan desa. Penelitian kedua adalah yang dilakukan oleh Setiaji dengan judul Sistem Transparansi Dana Desa Di Kabupaten Kudus Menggunakan Metode Algoritma Information Retrieval System, dengan hasil penelitian menghasilkan rancangan sistem informasi dana desa melalui diagram usecase yang dihasilkan menyediakan fasilitas untuk menggunakan aplikasi dalam penerimaan dan dana desa (Setiaji, 2018), bentuk pembeda dengan penelitian ini adalah prototype aplikasi pada penelitian Setiaji pengguna pada aplikasi ini tidak melibatkan masyarakat desa sebagai penerima dan pemakai hasil dari implementasi dana desa. Dan penelitian terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Wardani yaitu Rancang Bangun Sistem Publikasi Realisasi Anggaran Desa Berbasis Web dengan hasil penelitian bahwa website yang di buat untuk seorang admin atau staff Desa sangat memudahkan untuk mempublikasikan berita atau informasi, regulasi, perencanaan dan realisasi anggaran tentang Desa Kabubu kepada pemerintah jajaran yang lebih tinggi dan masyarakat, dan masyarakat lebih mudah ketika ingin mengetahui informasi seputar Desa Kabubu baik itu tentang perencanaan maupun realisasi anggaran desa dengan mengakses alamat website Desa Kabubu (Wardani, 2018). Dari pembanding dengan aplikasi yang sudah ada sebelumnya pada pengembangan prototype aplikasi dipenelitian ini bukan hanya menampilkan informasi laporan anggaran namun juga adanya komentar atau tanggapan dari warga tentang realisasi dari laporan tersebut. Sehingga untuk pemerintah pusat juga dapat memonitor penggunaan dana apakah sudah sesuai dengan kebutuhan warga/ rakyat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder, dimana data tersebut diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas melalui beberapa referensi berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang berasal dari internet, ataupun laporan akhir baik berupa skripsi atau tesis, sebagai dasar perbandingan dan penganalisaan data penulisan. Adapun jenis data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data variatif yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun metode pengumpulan data digunakan adalah:

1. Observasi

Metode observasi dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap suatu hal yang nyata dengan hal-hal atau kejadian yang ada hubungannya dengan dana desa, alokasi dana desa, dan transparansi dana desa, untuk melengkapi dan mencocokkan data yang diperoleh melalui interview atau wawancara.

2. Wawancara

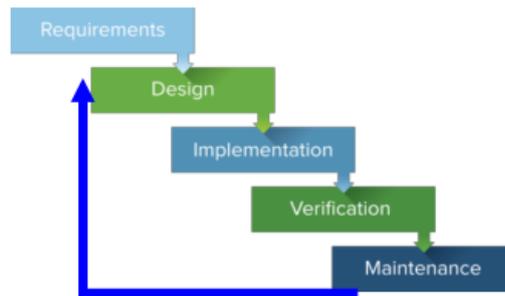
Metode wawancara dilakukan dengan melakukan dialog atau tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan dana desa dan alokasi dana desa yang selama ini untuk pelaporannya bagaimana, tidak lupa juga dalam wawancara ini dilakukan dengan sampel warga desa untuk diminta pendapat mengenai transparansi dana desa dan alokasi dana desa.

3. Literatur

Pada metode Literatur ini dilakukan pengumpulan contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan dana desa dan alokasi dana desa melalui sumber data yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian dilakukan dengan menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan kondisi nyata yang holistik, kompleks dan trinci dengan menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran dalam memperoleh hasil penelitian. Metode penelitian kualitatif ini didukung dengan

menggunakan model pengembangan sistem *waterfall*, dimana pada model ini terdiri atas beberapa tahapan seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Sumber: (Mendez, 2014)
Gambar 1. Model *Waterfall*

Gambaran model *waterfall* di atas terlihat ada beberapa tahapan dalam pembuatan aplikasi bantu transparansi dana desa dan alokasi dana desa yaitu:

1. Tahapan *requirement*
2. Tahapan *design*
3. Tahapan *implementation*
4. Tahapan *verification*
5. Tahapan *maintenance*

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan *Requirement*

Pada tahap pengumpulan kebutuhan pembuatan aplikasi bantu berbasis website ini, proses yang dilakukan adalah dengan membuat rencana awal website, berupa mendefinisikan kebutuhan data dan informasi awal situs, menentukan scope proyek, dan fitur-fitur yang diharapkan bisa diimplementasikan pada situs.

Analisis dari sistem dilakukan untuk mengembangkan situs website yang akan diimplementasikan pada situs website itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu apakah sistem yang digunakan dapat mendukung kebutuhan proyek baik dalam proses desain, *coding*, maupun *maintenance* dan juga nantinya akan menentukan apa saja yang akan dijadikan fitur pada situs web. Berikut adalah kebutuhan sistem website:

1) Hak akses

Tingkatan hak akses untuk pengguna, berikut penjelasan untuk hak akses admin, perangkat desa, dan warga masyarakat desa:

a. Admin

Memiliki akses ke halaman administrator melalui proses login. Login *credential* untuk admin dibuat langsung di dalam database, namun admin yang sudah memiliki akses, dapat mengubah dan menghapus informasi tersebut. Halaman login untuk admin dipisah dari halaman muka situs.

b. Perangkat Desa

Perangkat desa memiliki akses ke halaman profil dan produk melalui proses login. Login *credential* untuk pengguna dibuat dan disimpan kedalam database melalui proses registrasi. Setelah sukses login pengguna dapat mengubah data pribadi (profil), mengubah, menambah dan menghapus informasi berkaitan dengan desa terutama dalam hal ini informasi berkaitan erat dengan dana desa dan alokasi dana desa.

c. Warga Masyarakat Desa

Warga masyarakat desa dapat melakukan registrasi sebagai validasi apakah benar merupakan warga desa tersebut dengan akun user berupa NIK dan *password* disesuaikan dengan pilihan masing-masing warga. Registrasi dilakukan untuk mendapatkan hak akses sebagai warga masyarakat desa yang dapat melakukan interaksi secara aktif di aplikasi bantu berbasis *website* ini, warga masyarakat selain dapat melihat profil desa namun juga dapat memberikan suara berupa keluhan, masukan ataupun saran untuk kemajuan desa melalui aplikasi bantu, dan yang terpenting dan utama warga masyarakat dapat memonitor serta memberikan komentar terkait dengan laporan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa apakah sudah digunakan sesuai kenyataan yang ada dilapangan atau tidak, hal ini juga dapat menjadi rujukan untuk penyelenggara pemerintahan di atas desa untuk bisa ikut memonitor dan mengevaluasi penggunaan dana desa dan alokasi dana desa.

2) Pengelolaan Data

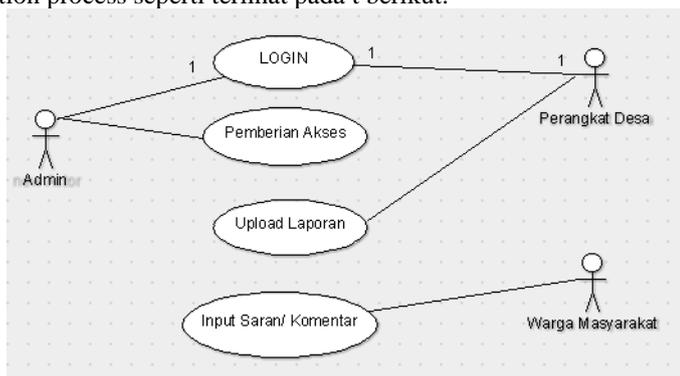
Adapun kebutuhan data yang akan diproses dalam aplikasi bantu transparansi dana desa dan alokasi dana desa ini, adalah sebagai berikut:

- a. Data laporan dana desa
- b. Data laporan alokasi dana desa
- c. Data warga masyarakat desa
- d. Data suara warga

Sehingga berdasarkan tahapan analisa kebutuhan di atas pada penelitian ini dibuatlah desain awal halaman-halaman aplikasi bantu transparansi dana desa dan alokasi dana desa yang nantinya akan digunakan sebagai alat bantu pengembangan situs, alat bantu ini biasa disebut dengan nama *wireframe*. Ketika pada tahap ini dirasa sudah lengkap maka pada tahapan selanjutnya adalah tahapan desain/ perancangan sistem yang akan dilakukan dengan membuat form-form esensial situs, dan mengembangkan storyboard. Selain desain awal untuk halaman umum (untuk pengunjung dan pengguna), halaman administratif juga dibutuhkan. Halaman admin ini nantinya dapat digunakan untuk mengakses, mengubah, dan menghapus informasi desa, pemberian hak akses perangkat desa dan sebagainya.

2. Tahapan Design

Pada tahapan ini, dilakukan dengan pengembangan hal-hal yang akan dilakukan sebagai kelengkapan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan proyek, setelah tahapan analisa kebutuhan pengembangan sistem sudah dilakukan sebelumnya, sehingga hasil pada tahap ini akan digunakan atau dimanfaatkan pada tahap berikutnya, yaitu perancangan Mekanisme Kinerja Sistem. Pada perancangan ini dilakukan dengan menggunakan tools yang sering disebut dengan UML (*Unified Modeling Language*), dengan merancang nya dalam suatu diagram *Use Case Diagram*. Sebelum mendesain dari mekanisme kerja sistem melalui use case diagram maka dirancang lebih dulu adalah use cae spesifcation process seperti terlihat pada t berikut:



Sumber: Hasil Penelitian(2021)

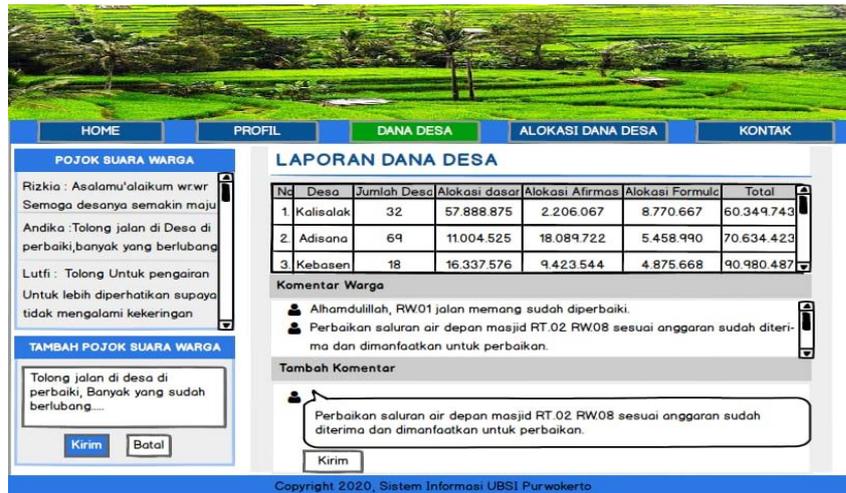
Gambar 2. Use Case Diagram

Tabel 1. Use Case *Specification Input Saran/ Komentar*

Penggunaan Nama Kasus	Input Saran/ Komentar
	- Perangkat desa meng- <i>upload</i> laporan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa
Deskripsi Singkat	- Laporan muncul dalam website - Warga masyarakat desa memberikan saran dan komentar pada form yang tersedia
Relationship	Klik kirim pada tombol yang terletak di bawah form komentar
Pre Condition	Sistem menyediakan form komentar yang dapat diisi
Post Condition	Sistem menampilkan hasil komentar yang di input melalui form.

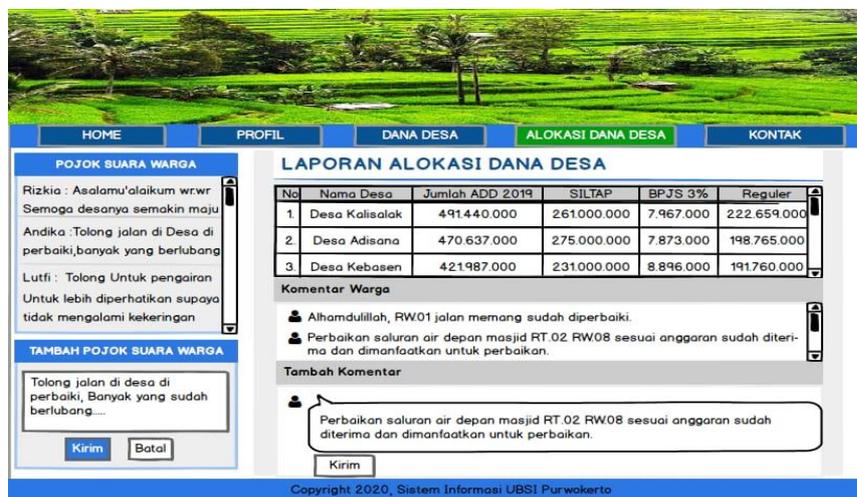
3. Tahapan Implementation

Tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan apa yang sudah di rancang/ desain sebelumnya baik rancangan sistem yang akan dijalankan, dan rancangan antar muka yang berkolaborasi menjadi satu sehingga membentuk aplikasi berbasis website yang diinginkan. Dengan beberapa contoh hasil implementasi tampilan sebagai berikut:



Sumber: Hasil Penelitian(2021)

Gambar 3. Contoh Implementasi Halaman Laporan Dana Desa



Sumber: Hasil Penelitian(2021)

Gambar 4. Contoh Implementasi Halaman Laporan Alokasi Dana Desa

4. Tahapan Verification

Tahapan selanjutnya dalam pengembangan aplikasi berbasis website ini setelah melalui tahap implementasi adalah dengan tahap *verification*/ pemeriksaan/ pengujian. Pengujian terhadap program yang dibuat menggunakan *blackbox* testing yang fokus terhadap proses masukan dan keluaran program.

Tabel 2. Contoh *Blackbox Testing* Terhadap Input Saran/ Komentar

No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Valid
1.	Warga masyarakat menginput saran/komentar di form yang tersedia kemudian klik tombol kirim	Inputan berupa karakter kurang dari 20 karakter	Sistem tidak menampilkan isian yang sudah diinputkan	Sesuai harapan	Valid
2	Warga masyarakat menginput saran/komentar di form yang tersedia kemudian klik tombol kirim	Inputan berupa karakter lebih dari 20 karakter	Sistem menampilkan isian yang sudah diinputkan	Sesuai harapan	Valid

5. Tahapan *Maintenance*

Tahapan *maintenance* dilakukan dengan cara mengevaluasi hasil pemakaian dengan jangka waktu tertentu, untuk dapat menemukan hal-hal yang menjadi kebutuhan tambahan bagi masyarakat desa pada website kedepannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang pembuatan/ pengembangan website aplikasi transparansi dana desa yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu memberikan transparansi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dengan adanya menu laporan dana desa dan laporan alokasi dana desa.
2. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam meninjau langsung penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dapat terlihat dengan adanya menu laporan dana desa dan laporan alokasi dana desa yang terpublish secara umum.

Untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas pelayanan publik di desa, dapat terlihat dengan adanya interaksi dari warga masyarakat desa pada aplikasi bantu berbasis website ini, masyarakat dapat memberikan saran dan komentar pada hasil laporan penggunaan dana desa ataupun laporan alokasi dana desa.

REFERENSI

- Gatra, S. (2019). *Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun?page=all>
- Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 430. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 597–602.
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2016). Sistem Akutansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Volume XIX No. 2, Agustus 2016, P., 1, 323–340*.
- Mendez, M. (2014). *The Missing Link, An Introduction to Web Development And Programming*. Open SUNY Textbooks, Milne Library (IITG PI) State.
- Mufli, M., & Prastyo, D. T. (2018). Rancang Bangun Sistem Informasi Keuangan Desa (Sikades) 1.0 Berbasis Android. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(2), 26–48. <https://doi.org/10.51289/peta.v3i2.345>
- Ramadani, M. (2018). *Transparansi di Dalam Pemerintahan*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/ramadani2/5c0771916ddcae1c874fe2cb/transparansi-didalam-pemerintahan?page=all>
- Setiaji, P. (2018). *Menggunakan Metode Algoritma Information Retrieval System*. 11(3), 246–252.
- Sopwan, M. (2020). *Aplikasi SIKADD, Edi: Untuk Transparasi Penggunaan Dana Desa*. Jambionline.Com. <https://jambiline.com/aplikasi-sikadd-edi-untuk-transparasi-penggunaan-dana-desa/>
- Swastika, V. M. (2019). *Dana Desa*. <https://www.kompasiana.com/vanessams/5c70006eab12ae0af214741e/dana-desa>
- Wardani. (2018). *Rancang Bangun Sistem Publikasi Realisasi Anggaran Desa Berbasis Web*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.